

**IMPLEMENTASI ASAS ITIKAD BAIK DALAM PEMBERIAN  
KESEMPATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN PENGADAAN BARANG  
JASA PEMERINTAH**

**(Studi Kontrak Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Taman Kota  
Lapangan Cindua Mato Kab. Tanah datar T.A 2020-2021)**

**TESIS**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**



**Disusun Oleh:**

**HARRY ISMARYADI, S.H.**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**TAHUN 2023**

# TESIS

## IMPLEMENTASI ASAS ITIKAD BAIK DALAM PEMBERIAN KESEMPATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH

(Studi Kontrak Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Taman Kota  
Lapangan Cindua Mato Kab. Tanah datar T.A 2020-2021)



**DOSEN PEMBIMBING :**

1. **DR. KHAIRANI, S.H, M.H**
2. **DR. YUSSY ADELINA MANNAS, S.H, M.H**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS  
TAHUN 2023**

**IMPLEMENTASI ASAS ITIKAD BAIK DALAM PEMBERIAN KESEMPATAN  
PENYELESAIAN PEKERJAAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH  
(Studi Kontrak Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Taman Kota Lapangan  
Cindua Mato Kab. Tanah datar T.A 2020-2021)**

(Harry Ismaryadi, 2120119008, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Andalas, 158 Halaman, 2023)

**ABSTRAK**

Salah satu perbuatan hukum Pemerintah di bidang hukum privat adalah melaksanakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya Kontrak Kerja Konstruksi untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur pelayanan publik. Kontrak Kerja Konstruksi antara Pemerintah sebagai Pengguna Jasa dengan pihak swasta sebagai Penyedia Jasa konstruksi, berlaku aturan hukum kontrak pada umumnya dan berlaku juga ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan Jasa Konstruksi. Asas utama yang melandasi hukum perjanjian adalah asas Itikad Baik. Suatu perjanjian tidak akan terlaksana dengan baik apabila dilaksanakan tidak dengan itikad baik. Adapun hal-hal yang menarik untuk dibahas antara lain; 1) Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Pengembangan Taman Kota Lapangan Cindua Mato Kab. Tanah datar Tahun Anggaran 2020-2021 2) Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pengembangan Taman Kota Lapangan Cindua Mato Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2020-2021 3) Kekuatan hukum putusan kontrak kerja secara sepihak oleh PPK PBL Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR terhadap Wanprestasi dari Penyedia Jasa PT. Monodon Pilar Nusantara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai itikad baik dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah hasil wawancara, dokumen kontrak dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen dan analisa data diolah secara kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pada tahap pelaksanaan kontrak, pengguna jasa dan penyedia jasa wajib untuk menaati keseluruhan isi kontrak kerja konstruksi dalam kondisi apapun sekaligus menaati kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang terkait dengan kontrak kerja konstruksi. Namun hal ini tidak dilaksanakan oleh Penyedia jasa, sehingga PPK dengan kewenangannya melakukan putusan kontrak sepihak sebagai konsekuensi hukum lebih lanjut dari hal-hal yang terjadi dalam pemenuhan kegiatan kontraktual yaitu tidak melaksanakan kewajiban kontrak walaupun telah diberikan kesempatan kepada penyedia jasa, sehingga kontrak dihentikan.

Kata Kunci: Asas Itikad Baik, Pemberian Kesempatan, Kontrak Konstruksi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

**IMPLEMENTATION OF GOOD FAITH PRINCIPLES IN GIVING  
OPPORTUNITIES TO COMPLETE GOVERNMENT GOODS SERVICES  
PROCUREMENT WORK**

**(Study of the Construction Work Contract for the Development of Cindua  
Mato Field City Park, Tanah Datar District, FY 2020-2021)**

(Harry Ismaryadi, 2120119008, Master of Law Study Program, Faculty of Law,  
Andalas University, 158 Pages, 2023)

**ABSTRACT**

One of the Government's legal actions in the field of private law is implementing Government Goods/Services Procurement Contracts, especially Construction Work Contracts to meet the needs of public service infrastructure. Construction Work Contracts between the Government as Service Users and the private sector as Construction Service Providers, contract law rules in general apply and statutory provisions related to Construction Services also apply. The main principle underlying contract law is the principle of good faith. An agreement will not be implemented properly if it is not implemented in good faith. The things that are interesting to discuss include; 1) Application of the Principles of Good Faith in Providing Opportunities to Complete the Development Work for the City Park, Field Cindua Mato, Tanah Datar District for the 2020-2021 Fiscal Year 2) Obstacles in the Implementation of the Cindua Mato Field City Park Development Work, Tanah Datar District for the 2020-2021 Fiscal Year 3) The legal power of unilateral termination of work contracts by PPK PBL Settlement Infrastructure Center for West Sumatra Region Directorate General of Cipta Work of the Ministry of PUPR on Defaults from Service Providers PT. Monodon Pillars of the Archipelago. The research method used is empirical juridical. This research is descriptive analysis in nature, with this research it is hoped that a comprehensive picture of good faith in the implementation of construction work contracts will be obtained. The main data sources in this study are the results of interviews, contract documents and the types of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques used interviews and document studies and data analysis was processed qualitatively. The results of the study concluded that at the contract execution stage, service users and service providers are required to comply with the entire contents of the construction work contract under any circumstances as well as comply with propriety, custom, and laws related to construction work contracts. However, this was not carried out by the service provider, so that the PPK with its authority terminated the contract unilaterally as a further legal consequence of matters that occurred in fulfilling contractual activities, namely not carrying out contractual obligations even though the service provider had been given the opportunity, so the contract was terminated.

Keywords: Good Faith Principles, Giving Opportunities, Government Procurement of Goods and Services Construction Contracts.